

**SISTEM INFORMASI PENGARSIPAN BEKAS PENANGAN PERKARA TINDAK PIDANA UMUM KEJAKSAAN NEGERI KUANTAN SINGINGI****Maimunah**

Program Studi Teknik Informatika,  
Fakultas Teknik,  
Universitas Islam Kuantan Singingi, Indonesia  
Jl. Gatot Subroto KM. 7 Kebun Nenas, Desa Jake, Kab. Kuantan Singingi

**ABSTRAK**

Kejaksaan Negeri Teluk Kuantan tidak terlepas dari penanganan berkas perkara untuk segera dilakukan penuntutan. Pada saat ini di Kejaksaan Negeri Teluk Kuantan penanganan berkas perkara dilakukan secara manual. Proses penanganan berkas perkara dimulai dari diterimanya Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) dari penyidik oleh bagian sekretariat hanya diregistrasi pada buku besar, setelah itu SPDP diserahkan kepada Kepala Seksi Tindak Pidana Umum (kasapidum) guna penunjukan jaksa, setelah penunjukan jaksa SPDP diberikan ke bagian prapenuntutan (pratut), di bagian pratut dibuatkan surat perintah penunjukan jaksa penuntut umum (P-16) dengan menggunakan microsoft word dan begitu seterusnya sampai dokumen itu masuk ke tahap II (tahap penuntutan). dengan adanya aplikasi pengarsipan berkas perkara ini dapat memudahkan dalam penyimpanan data tindak pidana umum, selain itu dalam pengolahan data tersimpan cukup baik dalam media penyimpanan database sehingga dalam pencarian data dan pembuatan laporan dapat dilakukan dengan cepat.

**Kata Kunci :** Sistem Informasi, PHP, MySQL, Pidana Umum.

**1. PENDAHULUAN**

Kejaksaan sebagai salah satu lembaga penegak hukum dituntut untuk lebih berperan dalam menegakkan hukum, perlindungan kepentingan umum, penegakkan hak asasi manusia, serta pemberantasan korupsi, kolusi, dan nepotisme. Dalam melaksanakan fungsi, tugas, dan wewenangnya. Di Kejaksaan Negeri terdapat dua jenis perkara yaitu perkara di bagian pidana umum dan perkara di bagian pidana khusus. Hukum pidana khusus adalah merupakan hukum pidana yang mengatur tindak pidana tertentu saja misalnya tindak pidana fiskal. Contoh kasus pidana khusus, antara lain : tindak pidana narkoba, korupsi dan pencucian uang. Sedangkan hukum pidana umum adalah hukum pidana yang dibentuk oleh pemerintah pusat yang berlaku bagi subjek hukum yang berada dan berbuat melanggar larangan hukum pidana di seluruh wilayah hukum negara. Sebagian contoh kasus pidana umum, antara lain : kekerasan akibat perkelahian atau penganiyaan, kejahatan kesusilaan, pembunuhan, pencurian, penipuan.

Terkait dengan tugas utama Kejaksaan, Kejaksaan Negeri Teluk Kuantan tidak terlepas dari penanganan berkas perkara untuk segera dilakukan penuntutan. Pada saat ini di Kejaksaan Negeri Teluk Kuantan penanganan berkas perkara dilakukan secara manual. Proses pengarsipan berkas perkara dimulai dari diterimanya Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) dan dokumen lainnya dari penyidik oleh bagian sekretariat hanya

diregistrasi pada buku besardan di arsipkan pada tempat pengarsipan sehingga sering terjadi kehilangan dan kerusakan dokumen berkas perkara tersebut.

## 2. METODE PENELITIAN

### 2.1 Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik untuk pengumpulan data adalah sebagai berikut :

a) Wawancara (Interview)

Merupakan suatu pengumpulan data yang dilakukan dengan cara tanya jawab atau dialog secara langsung dengan pihak-pihak yang terkait dengan penelitian yang dilakukan. Dalam hal ini penulis melakukan tanya jawab kepada bagian umum Kejaksaan Negeri Kabupaten Kuantan Singingi.

b) Pengamatan (Observasi)

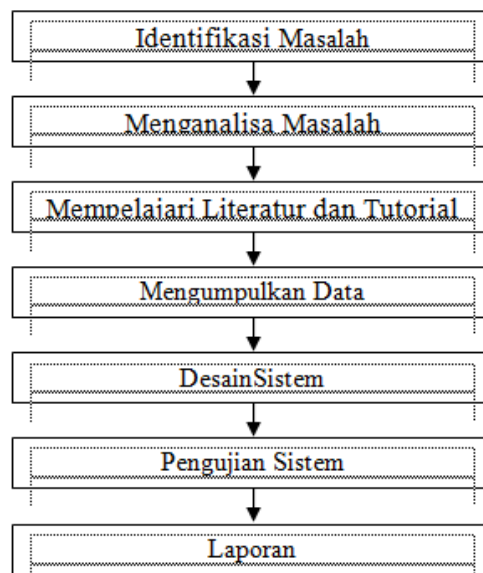
Yaitu metode pengumpulan data dengan cara mengadakan tinjauan secara langsung ke objek yang diteliti. Untuk mendapatkan data yang bersifat nyata dan meyakinkan maka penulis melakukan pengamatan langsung pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Kuantan Singingi.

c) Studi Pustaka

Untuk mendapatkan data-data yang bersifat teoritis maka penulis melakukan pengumpulan data dengan cara membaca dan mempelajari buku-buku, makalah ataupun referensi lain yang berhubungan dengan masalah yang dibahas.

### 2.2 Rancangan Penelitian

Adapun rancangan dari penelitian ini dapat penulis uraikan dalam bentuk diagram alur seperti dibawah ini.



Gambar 1. Rancangan Penelitian

## 3 HASIL DAN PEMBAHASAN

### 3.1 Analisa Sistem Yang Sedang Berjalan

Pada tahap analisa diperlukan suatu pendekatan analisa guna menghindari kesalahan-kesalahan yang mungkin muncul pada tahap berikutnya, yaitu perancangan sistem baru. Karena pada tahap ini merupakan tahapan yang sangat penting, pendekatan yang dilakukan adalah mendefinisikan masalah pada sistem yang sedang berjalan dan sekaligus melakukan

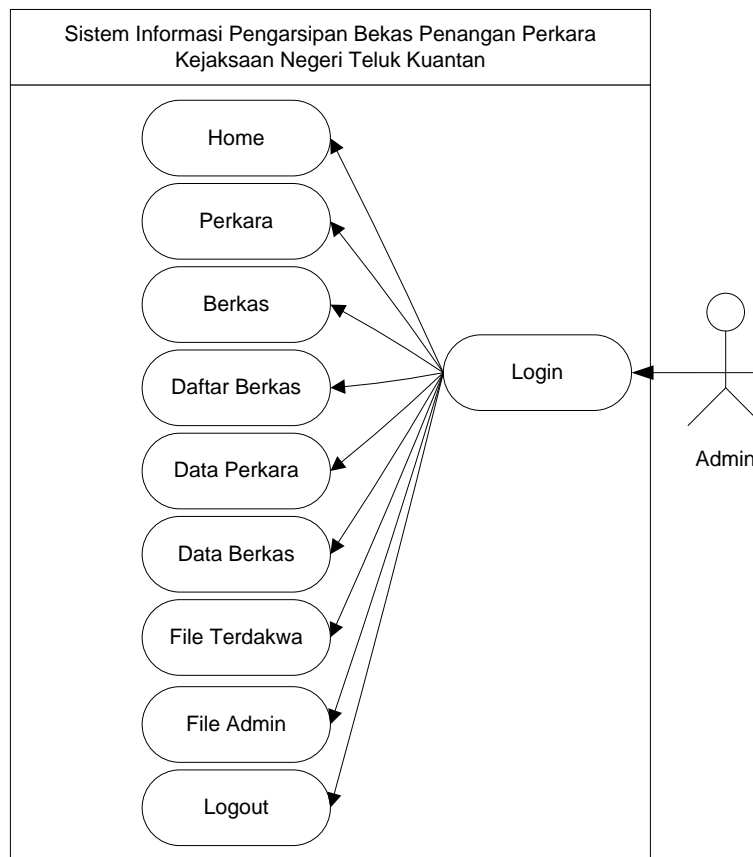
evaluasi setiap cara kerja sistem yang sedang berjalan berdasarkan prosedur-prosedur yang ada. Sehingga akan diketahui permasalahannya serta kesulitan apa saja yang dihadapi oleh sistem yang sedang berjalan, apa saja pengaruhnya dan harus diperhatikan validasinya terhadap sasaran sistem yang dirancang sebelum dilakukan perbaikan.

Sistem yang sedang berjalan pada Kejaksaan Negeri Teluk Kuantan dalam penanganan berkas perkara masih dilakukan secara manual. Proses penanganan berkas perkara dimulai dari diterimanya Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) dari penyidik oleh bagian sekretariat hanya diregistrasi pada buku besar, setelah itu SPDP diserahkan kepada Kepala Seksi Tindak Pidana Umum (kaspidum) guna penunjukan jaksa, setelah penunjukan jaksa SPDP diberikan ke bagian prapenuntutan (pratut), di bagian pratut dibuatkan surat perintah penunjukan jaksa penuntut umum (P-16) dengan menggunakan microsoft word dan begitu seterusnya sampai dokumen itu masuk ke tahap II (tahap penuntutan).

Sedangkan permasalahan yang terjadi pada tahap prapenuntutan dan tahap penuntutan antara lain, pada tahap prapenuntutan, setiap harinya terdapat 10 (sepuluh) hingga 20 (duapuluh) perkara atau SPDP yang masuk. Dan apabila pegawai melakukan pencarian berkas perkara masih harus mencarinya dengan cara manual, yaitu mencari satu persatu data yang telah diarsipkan. Hal ini membutuhkan waktu yang lama karena belum terdapat database yang memuat berkas perkara secara softcopy.

### 3.2 Use Case Diagram

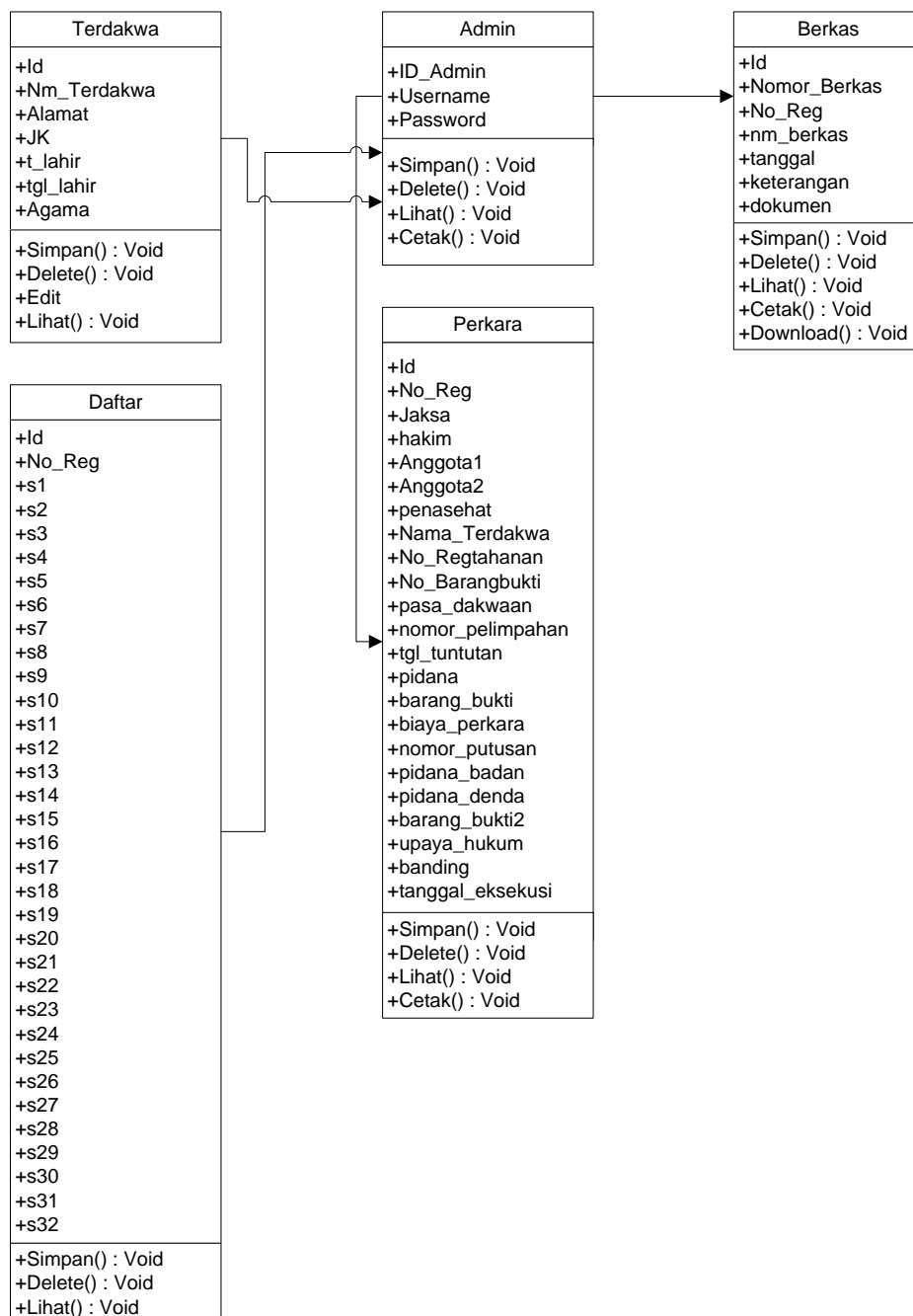
Adapun use case pengarsipan bekas penanganan perkara Kejaksaan Negeri Teluk Kuantan ini sebagai berikut :



Gambar 2. Use Case Diagram

### 3.3 Class Diagram

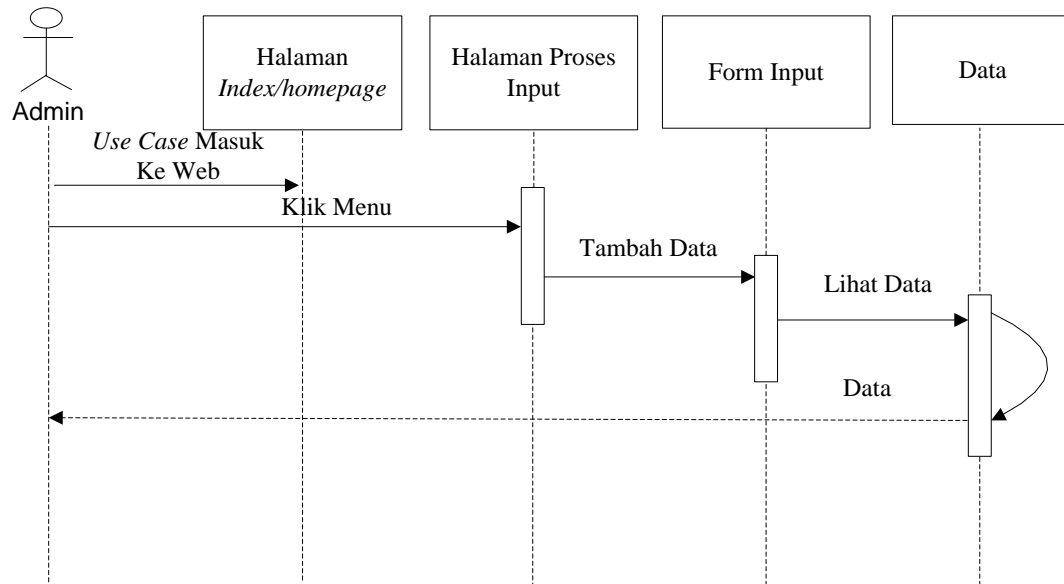
Class diagram membantu kita dalam visualisasi struktur kelas-kelas dari suatu Sistem dan merupakan tipe diagram yang paling banyak dipakai. Class diagram memperlihatkan hubungan antar kelas dan penjelasan detail tiap-tiap kelas didalam model desain (dalam logical view) dari suatu Sistem. Selama proses analisa, class diagram memperlihatkan aturan-aturan dan tanggung jawab entitas yang menentukan perilaku sistem. Selama tahap desain, class diagram berperan dalam menangkap struktur dari semua kelas yang membentuk arsitektur yang dibuat. Adapun class diagram pada rancangan website pengarsipan bekas penangan perkara Kejaksaan Negeri Teluk Kuantan sebagai berikut :



Gambar 3. Class Diagram

### 3.4 Sequence Diagram

*Sequence Diagram* menggambarkan aktivitas sebuah *website* dalam proses alur penampilan pesan (*message*) yang di inputkan pada objek-objek *web* tersebut. Berikut ini dapat digambarkan *sequence diagram*.



Gambar 4. *Sequence Diagram*

### 3.5 Implementasi Program

Implementasi program dilakukan dengan setiap halaman aplikasi yang dibuat dan pengkodeannya dalam bentuk file program. Berikut ini adalah implementasi antarmuka dalam pembuatan sistem Bekas Penangan Perkara Tindak Pidana Umum Kejaksaan Negeri Teluk Kuantan.

#### 1. Form Login Admin

Gambar 5. Form Login Admin



## 2. Menu Utama

**Visi dan Misi Kejaksaan**

**Visi Kejaksaan :**  
Kejaksaan sebagai lembaga penegak hukum yang bersih, efektif, efisien, transparan, akuntabel, untuk dapat memberikan pelayanan prima dalam mewujudkan supremasi hukum secara profesional, proporsional dan bermartabat yang berlandaskan keadilan, kebenaran, serta nilai – nilai kepautan.

**Misi Kejaksaan :**

1. Mengoptimalkan pelaksanaan fungsi Kejaksaan dalam pelaksanaan tugas dan wewenang, baik dalam segi kualitas maupun kuantitas penanganan perkara seluruh tindak pidana, penanganan perkara Perdata dan Tata Usaha Negara, serta pengoptimalan kegiatan Intelijen Kejaksaan, secara profesional, proposional dan bermartabat melalui penerapan Standard Operating Procedure (SOP) yang tepat, cermat, terarah, efektif, dan efisien.
2. Mengoptimalkan peranan bidang Pembinaan dan Pengawasan dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas bidang-bidang lainnya, terutama terkait dengan upaya penegakan hukum.
3. Mengoptimalkan tugas pelayanan publik di bidang hukum dengan penuh tanggung jawab, taat azas, efektif dan efisien, serta

**Gambar 6. Menu Utama**

## 3. Form Input Data Perkara

**File Data Terdakwa**

No. Reg. Perkara :

Jaksa Penuntut Umum :

Hakim Ketua :

Hakim Anggota 1 :

Hakim Anggota 2 :

Penasehat Hukum :

Nama Terdakwa / Terpidana :

Nomor Reg. Tahanan :

Nomor Reg. Barang Bukti :

Pasal Dakwaan :

Nomor dan Tanggal Pelimpahan :

Tanggal Tuntutan :

Pidana Badan :

Barang Bukti :

Biaya Perkara :

Nomor dan Tanggal Putusan :

Pidana Badan :

Pidana Denda :

Barang Bukti :

Upaya Hukum :

Banding :

Tanggal Eksekusi :

**Gambar 7. Form Input Data Perkara**



#### 4. Form Input Berkas Perkara

**File Berkas Perkara**

File :  No file chosen

No. Reg. Perkara : -- Pilih --

Nama Berkas :

Tanggal :

Keterangan :

Gambar 8. Form Input Berkas Perkara

#### 5. Form Input Daftar Isi Berkas Perkara

**Daftar Isi Berkas Perkara**

No. Reg. Perkara : -- Pilih --

An. Terdakwa :

Jaksa Penuntut Umum :

No.	SURAT-SURAT MODEL FORMULIR PERKARA	ADA / TIDAK
1	Surat Pembentahan Densitas Periydikan	SPDP : <input type="text"/>
2	Surat Perintah Penyjukan Jaksa PU Untuk Melakukan Penelitian dan Penyelidikan	P-16 : <input type="text"/>
3	Surat Perpanjangan Penahanan	T-4 : <input type="text"/>
4	Berkas Perkara	: <input type="text"/>
5	Surat Hasil Penelitian Berkas Perkara	: <input type="text"/>
6	Pembentahan Hasil Periydikan Belum Lengkap	P-18 : <input type="text"/>
7	Pengembalian Berkas Untuk di Lengkapi	P-19 : <input type="text"/>
8	Pembentahan Hasil Periydikan Sudah Lengkap	P-21 : <input type="text"/>
9	Penyerahan Tersangka dan Barang Bukti dan Periydik	: <input type="text"/>
10	Surat Perintah Penyjukan Jaksa PU untuk Penyelesaian Perkara Tidak Pidana	P-16 A : <input type="text"/>
11	Surat Perintah Penahanan/Pengalihan Jenis Penahanan (Tingkat Lanjut)	T-7 : <input type="text"/>
12	Berita Acara Pelaksanaan Perintah Penahanan/Penahanan Lanjut	BA-7 : <input type="text"/>
13	Berita Acara Penemuan dan Penilitan Tersangka	BA-4 : <input type="text"/>
14	Berita acara penerimaan dan penilitan berita sitaan/barang bukti	BA-5 : <input type="text"/>
15	Surat Dakwaan (Pemeriksaan Biasa) catatan penuntut umum (untuk tindak pidana yang didakwakan)(Pemeriksaan Singkat)	P-29 : <input type="text"/>
16	Surat pelimpahan perkara acara pemeriksaan biasa surat pelimpahan perkara acara singkat	P-31 : <input type="text"/>
17	Surat pengantar Pelimpahan Perkara	P-32 : <input type="text"/>
18	Tanda terima Surat pelimpahan perkara acara pemeriksaan biasa/singkat	P-33 : <input type="text"/>
19	Surat Penetapan Sidang (Dan Pengadilan)	: <input type="text"/>
20	Surat Penetapan Penahanan Hakim (Dan Pengadilan)	: <input type="text"/>
21	Berita acara Pelaksanaan Penetapan Hakim	BA-15 : <input type="text"/>
22	Surat Pengalihan Saksi/Terdakwa/Terpidana	P-37 : <input type="text"/>
23	Bencana Tuntutan Pidana	P-41 : <input type="text"/>
24	Surat Tuntutan	P-42 : <input type="text"/>
25	Laporan Jaksa PU segera setelah Putusan Pengadilan	P-44 : <input type="text"/>
26	Surat Putusan Pengadilan (Vonis Hakim)	: <input type="text"/>
27	Surat Perintah Pelaksanaan Putusan Pengadilan	P-48 : <input type="text"/>
28	Berita Acara Pelaksanaan Putusan Pengadilan	BA-17 : <input type="text"/>
	Berita Acara pengembalian barang bukti	BA-20 : <input type="text"/>
	Berita acara penyerahan barang sitaan yang bersifat terlarang/barang rampasan/barang bukti yang dikembalikan tetapi tidak diambil/barang temuan untuk dimanfaatkan/dimusnahkan	BA-22 : <input type="text"/>
	Berita Acara pemusnahan barang bukti	BA-23 : <input type="text"/>
30	Tanda terima pembayaran denda/denda ganti rugi uang pengganti biaya perkara	D-2 : <input type="text"/>
31	Kartu Perkara Tidak Pidana	P-53 : <input type="text"/>
32	Bwayat Perkara	P-28 : <input type="text"/>

Gambar 9. Form Input Daftar Isi Berkas Perkara



## 6. Form Input File Terdakwa

The image shows a web form titled "File Terdakwa". It contains several input fields: "Nama Terdakwa" (text), "Alamat" (text area), "Jenis Kelamin" (dropdown menu with "Pilih" selected), "Tempat Lahir" (text), "Tanggal Lahir" (text with format mm/dd/yyyy), and "Agama" (dropdown menu with "Pilih" selected). At the bottom of the form, there are two orange buttons labeled "Simpan" and "Hapus". In the bottom right corner, there is a link that says "Data Terdakwa".

**Gambar 10. Form Input File Terdakwa**

## 4 PENUTUP

### 4.1 Kesimpulan

Adapun kesimpulan dari penelitian ini dapat penulis paparkan sebagai berikut :

1. Selama ini para pegawai dalam pengarsipan berkas perkara umum melakukan pengarsipan secara manual dengan cara meencatat kedalam buku besar sehingga menyulitkan dalam pencarian data tersebut, dengan adanya aplikasi pengarsipan berkas perkara ini dapat memudahkan dalam penyimpanan data tindak pidana umum, selain itu dalam pengolahan data tersimpan cukup baik dalam media penyimpanan database sehingga dalam pencarian data dan pembuatan laporan dapat dilakukan dengan cepat.
2. Berkas perkara yang masuk dapat diolah dengan baik menggunakan aplikasi ini, aplikasi ini juga memiliki pengamanan berupa password sehingga data tidak dapat digunakan oleh orang lain.

### 4.2. Saran

Adapun saran yang dapat penulis berikan sebagai berikut :

1. Sistem ini kami rasa belum sempurna dan dapat dikembangkan lagi oleh peneliti berikutnya dengan data yang cukup kompleks.
2. Pengguna sebaiknya harus dilakukan pelatihan terlebih dahulu untuk penerapan sistem ini.
3. Sistem ini hanya dapat digunakan pada sebuah PC, sebaiknya untuk password aplikasi tidak di beritahukan kepada orang lain selain atasan.

## DAFTAR PUSTAKA

- [1] Abdul Kadir. 2014. Pengenalan Sistem Informasi Edisi Revisi. Andi.Yogyakarta.
- [2] Faizatush Sholikhah dan Dewi Kumalaeni. 2017. Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP):Penelusuran Arsip Berkas Perkara Di Pengadilan Agama Temanggung. Yogyakarta . Jurnal Diplomatika, Vol. 1, No. 1 September 2017.





- [3] Hengki Tamando Sitohang. 2018. Sistem Informasi Pengagendaan Surat Berbasis Web Pada Pengadilan Tinggi Medan. Medan. urnal Of Informatic Pelita Nusantara Volume 3 No 1 Maret 2018 e-ISSN 2541-3724.
- [4] Kusumaningati Sulistya Wardhani. 2014. Pengembangan Sistem Informasi Kartu Menuju Sehat Sebagai Alternatif Pengelolaan Posyandu Secara Digital. Skripsi. Program Studi Pendidikan Teknik Informatika. Universitas Negeri Yogyakarta.
- [5] Sandra Aliska, dkk. 2018. Sistem Informasi dan Manajemen Pemberkasan Perkara di Kejaksaan Negeri Mempawah. Tanjungpura. JustIN Vol.6, No. 1, (2018).